DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press

Chomzah, Ali Ahmad. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Gautama, Sudargo. 1973. *Masalah Agraria*. Bandung: Alumni

Harsono, Budi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.* Jakarta: Djambatan

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: UII Press

Koentjaraningrat. 1982. *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan.*Jakarta: Gramedia

Limbong, Bernhand. 2012. *Konflik Pertanahan.* Jakarta: Rafi Maju Mandiri

Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah.* Bandung: Mandar Maju

Nader and Todd. 1985. *Dispute Process In TenSocieties(Terjemahan Marwan).*Jakarta: Yayasan Obor

Parlindung, A.P. 1982. *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT.*Bandung: Alumni

----------. 1994. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA.* Bandung: Mandar Maju

Salindeho, John. 1993. *Hukum Agraria Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan peralihan Hak atas Tanah.* Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali

---------- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

Soemitro, Ronni Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurmetri. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2000.*Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta:Liberty

Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.*Jakarta: Djambatan

Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menentukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah).* Jakarta: Prestasi Pustaka

Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi & Akademisi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-Lainnya, yang Aktanya Belum Diganti

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

C. Makalah

Erlita Rahmi. *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia.*Skripsi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

Estevina Pangemanan. 2013. *Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.* Dalam Jurnal Lex Privatum, Vol.I/ No.4

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemayoran,_Jakarta_Pusat diunduh tanggal 1 maret 2016 pada pukul 13.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Kemayoran diunduh tanggal 1 maret 2016 pada pukul 13.40

LAMPIRAN